

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan LAKIP ini merupakan hasil dari evaluasi kinerja Sasaran Strategis dan pencapaian masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi serta Uraian Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Peternakan.

Laporan LAKIP ini juga diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur bagi peningkatan kinerja, peningkatan perencanaan maupun penggunaan sumberdaya, serta mendorong penyelenggaraan tugas secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disadari bahwa dalam penyusunan LAKIP ini masih belum sempurna baik materi maupun penulisannya, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Selong, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lombok Timur,



Dr. H. MASYHUR, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661231 199203 1 150

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Dasar Hukum	8
1.3. Kondisi Geografis	10
1.4. Kondisi Demografis	13
1.5. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lombok Timur ..	15
1.6. Ruang Lingkup	18
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Startegis	19
2.2. Tujuan dan Sasaran	19
2.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	20
2.4. Prioritas Pembangunan Tahun 2021	21
2.5. Indikator Kinerja Utama	21
2.6. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	30
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama	30
3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja	35
3.4. Akuntabilitas Keuangan	50
BAB IV. PENUTUP	57
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Perjanjian Kerja Tahun 2022	
Evaluasi Kinerja Triwulan Tahun 2022	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Jumlah hari hujan dan curah hujan per bulan tahun 2020 di Kabupaten Lombok Timur	12
Tabel 1.2	Jumlah penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2020	14
Tabel 1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur, 2019 dan 2020	14
Tabel 1.4.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Lombok Timur (miliar rupiah), 2016–2020	17
Tabel 1.5	PDRB atas dasar harga konstan (persen) menurut pengeluaran Kabupaten Lombok Timur 2016 – 2020	17
Tabel 2.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.	22
Tabel 2.2	Rencana Indikator Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022	22
Tabel 3.1	Capaian indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022.	32
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022	35
Tabel 3.3	Realisasi distribusi ternak tahun 2022	44
Tabel 3.4	Realisasi Pelayanan Kesehatan Ternak di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.	45
Tabel 3.5	Jumlah usaha pemotongan ternak yang mengurus rekomendasi tahun 2022	49
Tabel 3.6	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Anggaran Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022	50
Tabel 3.7	Realisasi Efisiensi Kinerja Anggaran Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022	55

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Produksi Daging Sapi di Kabupaten Lombok Timur 2017-2021	31
Grafik 3.2 Perkembangan Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Lombok Timur 2017 – 2021	32
Grafik 3.3 Produksi daging ternak Sapi tahun 2017 – 2022 di Kabupaten Lombok Timur	33
Grafik 3.4 Pertumbuhan Populasi ternak sapi tahun 2017 – 2022 di Kabupaten Lombok Timur	43

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 telah ditetapkan tujuan pembangunan peternakan yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2018 – 2023) antara lain (a) Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu hasil peternakan.

Disamping tujuan tersebut, terdapat sasaran utama yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun 2018 – 2023 yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 sebagai tahun ketiga Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur telah melakukan berbagai upaya nyata melalui beberapa Program dan Kegiatan prioritas sehingga berdampak kepada peningkatan produksi dan produktivitas komoditi peternakan seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas ternak di Kabupaten Lombok Timur. Pada tahun 2017 Produksi daging Sapi di Kabupaten Lombok Timur tercatat 15.983,71 Ton kemudian meningkat menjadi 16.871,70 Ton tahun 2018. Demikian juga dengan tahun 2021 peningkatan produksi daging ternak mencapai 20.038,95 Ton bila dibandingkan dengan Produksi daging tahun 2020 yaitu sebanyak 18.599,66 Ton atau telah melampaui target yang ditetapkan dalam sasaran strategis OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 yaitu sebanyak 19.343,6 Ton (103,5 %) namun di tahun 2022 berbanding terbalik dimana terjadi penurunan produksi daging Sapi sebesar 20,08 % dari tahun lalu hal ini disebabkan oleh wabah penyakit Mulut dan Kuku yang melanda Kabupaten Lombok Timur dan daerah lainnya di Indonesia dan demikian juga dengan populasi ternak sapi dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 20,0 % khusus untuk ternak sapi.

PDRB Lombok Timur menunjukkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB. Pada tahun 2019, sekitar 27,04 persen. Pada tahun 2020, sekitar 27,89 persen PDRB Lombok Timur berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Persentase ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sekitar 27,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 kecenderungan penduduk Lombok Timur untuk beralih ke sektor pertanian meningkat.

Pelayanan kesehatan hewan dari tahun ketahun kinerjanya terus meningkat, pada tahun 2018 pelayanan sebanyak 15.075 ekor meningkat menjadi 16.372 ekor tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 25.295 ekor sedangkan tahun 2021 meningkat lagi menjadi 25.981 ekor dan tahun 2022 dengan adanya biaya oprasional Puskesmas dan terjadinya wabah PMK maka pelayanan Kesehatan meningkat menjadi 52.222 ekor. Terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan amannya masyarakat veteriner dalam mengkonsumsi produk peternakan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh dan Halal) mengindikasikan bahwa kinerja bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner berjalan baik, bahkan yang menjadi salah satu barometer keberhasilan pembangunan peternakan adalah mampu mengatasi berkembangnya PMK dalam waktu yang singkat dimana di bulan Desember 2022 Kabupaten Lombok Timur telah nol kasus PMK.

Untuk mengatasi dampak pandemik covid 19 dan wabah PMK maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur menempuh kebijakan yaitu memberikan Subsidi bunga pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi Ternak Sapi kepada peternak dalam dua tahun terakhir sehingga masyarakat terbebas dari angsuran bunga bank. Melalui program yang diberinama Program Lotim Berkembang Kabupaten Lombok Timur mendapat penghargaan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Pusat sebagai Kabupaten terbaik dalam Inovasi Program Pengembangan Akses Keaungan di Sub Sektor Peternakan

Dari beberapa tantangan yang dihadapi pada tahun 2022 dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut telah mampu dilalui dengan baik walaupun terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi antara lain (1) masih diperlukan penambahan personil peternakan yang profesional dan berintegritas dalam membangun peternakan Lombok Timur kedepan, (2) Produk olahan komoditi peternakan masih kurang mampu bersaing dengan daerah lain yang berasal dari luar NTB. (3) Terjadinya wabah PMK, penyakit menular (pandemi Covid-19) dan kenaikan harga BBM menyebabkan menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat karena terbatasnya akses dan kebebasan berusaha.

Dalam menghadapi kendala – kendala yang ada maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur telah berupaya untuk (1) mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menempatkan staf yang profesioanal sesuai dengan bidangnya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur terutama tenaga yang berstatus ASN serta melakukan analisa Jabatan untuk mengetahui beban tugas masing – masing OPD yang ada serta adanya pelatihan manajemen kepemimpinan bagi aparatur sipil negara; (2) sebagai solusi untuk mengatasi persaingan komoditi dipasaran adalah dengan memperbaiki jaringan pemasaran ternak, peningkatkan kualitas sarana pengolahan hasil, menjalin pola kemitraan usaha sehingga menjadi lebih baik dan masyarakat termotivasi untuk memelihara ternak, dengan demikian tumbuhnya daya saing dalam mengembangkan komoditi peternakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan amanat TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Mengacu kepada Perpres tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, berbagai isue strategis yang dihadapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur antara lain (1) Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi peternakan, (2) terjadinya perubahan iklim global sehingga berdampak terhadap komoditi peternakan baik secara langsung maupun tidak langsung; (3) harga komoditi peternakan yang tidak stabil mengancam ketahanan pangan dan inflasi daerah seperti harga daging dan telur (4) Ketersediaan pakan ternak berkualitas yang semakin terbatas terutama pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak dan (5) Mewabahnya penyakit hewan menular yang mengancam ketahanan pangan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

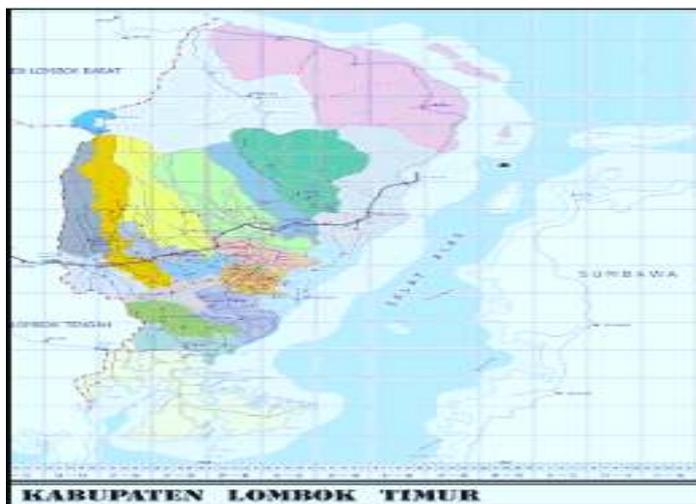
1. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023;
17. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022.

1.3. Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Timur

1.3.1. Letak geografis dan luas wilayah

Kabupaten Lombok Timur secara geografis terletak antara (116° – 117°) Bujur Timur dan antara (8°-9°) Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten



Lombok Barat dan Lombok Tengah di sebelah barat, Selat Alas di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas wilayah termasuk daerah pantai dihitung 4 mil dari garis pantai tercatat

2.679,99 km², terdiri atas daratan seluas 1.605.55 Km² (59,91 %) dan lautan 1.074,33 Km² (40,09 %). Dari daratan Kabupaten Lombok Timur seluas 160.555 Ha. Terdiri atas lahan sawah seluas 45.332 Ha. dan lahan kering 115.223 Ha.

Kondisi geografis Kabupaten Lombok Timur sangat bervariasi. Wilayah utara didominasi oleh perbukitan dengan kemiringan di atas 40 % dengan luas wilayah sekitar 13,19%, sedangkan wilayah tengah dan selatan merupakan daerah datar dengan kemiringan 16 – 40 % meliputi luas wilayah sekitar 29,48 %. Wilayah Selatan dengan kemiringan 0 – 15 % mencakup wilayah sekitar 57,33 %.

Dari kondisi di atas menggambarkan keadaan wilayah dataran tinggi terletak di bagian utara (kawasan gunung rinjani), hamparan dataran rendah terletak di bagian tengah hingga bagian selatan dengan sedikit wilayah berbukit-bukit di bagian selatan yang berbatasan dengan samudera Indonesia. Sebagian besar wilayah Lombok Timur dibatasi oleh lautan /daerah pantai yang terbentang mulai bagian utara ke arah timur hingga ke bagian selatan. Hal ini yang menjadi salah satu karakteristik potensi sumber daya alam (SDA) wilayah yaitu kelautan selain pertanian.

Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yaitu: Kecamatan Keruak, Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan sikur, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Selong, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Suela, Kecamatan Aikmel,

Kecamatan Lenek, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Sambelia.

1.3.2. Ketinggian Wilayah di atas Permukaan Laut

Ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Timur bervariasi dari 0 meter dari permukaan laut (d.p.l), sampai dengan 3.726 m (d.p.l) untuk daerah pegunungan. Atas dasar ketinggian wilayah tersebut maka dapat dibuat kriteria kondisi wilayah menjadi daerah datar, yaitu kelerengan antara 0 – 2 %, landai bergelombang dengan kelerengan 2 – 15 %, daerah dataran tinggi antara 15 – 40 % dan yang paling ekstrem adalah daerah yang curam atau bergunung-gunung dengan kelerengan > 40 %.

Berdasarkan klasifikasi topografi, maka untuk kelerengan antara 0 – 2 % atau daerah yang datar mencakup Kecamatan Jerowaru, Keruak, Labuhan Haji dan Kecamatan Pringgabaya dengan luas keseluruhan mencapai 2.576 Ha. Untuk wilayah dengan kelerengan antara 2 – 5 % dan merupakan kriteria kelerengan yang dominan di Kabupaten Lombok Timur mencakup wilayah Kecamatan Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Sukamulia, Suralaga, Terara, Montong Gading, Sikur, Masbagik, Pringgasela, Aikmel, Wanasaba, Suela dan Kecamatan Sambalia dengan luas keseluruhan 96.763 Ha, sedangkan wilayah dengan kelerengan antara 15 – 40 % mencakup sebagian wilayah Kecamatan Suela dan sebagian wilayah Kecamatan Sembalun. Adapun untuk wilayah yang paling curam dengan kelerengan > 40 % meliputi daerah pegunungan Rinjani yang ada di Kecamatan Sembalun. Wilayah dengan kelerengan lebih dari 40 % tidak layak menjadi tanah usaha.

1.3.3. Hidrologi dan Iklim

Kabupaten Lombok Timur beriklim tropis yang dipengaruhi oleh angin dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, serta perubahan tekanan udara pada garis katulistiwa. Curah hujan rata-rata bulanan menunjukkan bahwa di daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 terjadi bulan-bulan kering (< 100 mm) mulai bulan Juni sampai dengan oktober dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni, Juli dan agustus. Bulan-bulan lembab (100-200 mm) terjadi pada bulan Nopember sampai dengan Mei 2020.

Tabel 1.1 Jumlah hari hujan dan curah hujan per bulan tahun 2021 di Kabupaten Lombok Timur

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)	Penyinaran Matahari Duration of Sunshine (%)
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	412,30	23,00	28,76
Februari/February	302,20	22,00	37,89
Maret/March	221,90	16,00	47,31
April/April	36,10	7,00	65,15
Mei/May	29,20	3,00	71,88
Juni/June	189,40	8,00	61,17
Juli/July	3,10	3,00	71,19
Agustus/August	26,60	7,00	71,75
September/September	70,30	5,00	53,62
Oktober/October	132,70	10,00	62,84
November/November	317,00	15,00	33,39
Desember/December	208,20	17,00	43,69

Catatan/Note : Pengamatan dari Stasiun Meteorologi terdekat dengan wilayah Lombok Timur yaitu Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid di Lombok Tengah / Observations from the closest Meteorological Station to the Lombok Timur Regency area are Zainuddin Abdul Madjid Meteorological Station in Lombok Tengah Regency

Sumber/Source : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika/ Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency

Sumber : Lombok Timur Dalam Angka 2022

Bulan kering menurut Schmidt dan Ferguson (1951), yaitu curah hujan < 60 mm terjadi selama 6 bulan, mulai bulan mei sampai dengan oktober, sedangkan bulan basah (curah hujan > 100 mm) umumnya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan maret. Sedangkan menurut Klasifikasi Oldmen (1982) bulan kering (curah hujan <100 mm) terjadi selama 7-8 bulan, dan bulan basah (curah hujan >200 mm) terjadi selama 2-3 bulan.

Fluktuasi curah hujan dan rata-rata curah hujan selama 3 tahun terakhir sangat bervariasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha pertanian menyangkut musim tanam, Ketersediaan pakan ternak dan komoditi maupun jenis usaha yang dikembangkan.

1.3.4. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan perkembangan fisik wilayah (spatial) yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari semakin

luasnya area terbangun (builds of area) yang ada sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan ruang atau tanah untuk kebutuhan pembangunan perumahan, perkantoran, perdagangan dan lain-lain baik di perkotaan maupun pedesaan.

Pesatnya area yang terbangun ini menyebabkan terjadinya berbagai mutasi penggunaan lahan dari tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Mutasi penggunaan lahan ini banyak terjadi di sepanjang jalan arteri (koridor timur barat) dan jalan kolektor (koridor lingkaran selatan, serta pada kawasan pesisir pantai selatan (koridor selatan). Perubahan spasial ini menunjukkan bahwa perkembangan fisik wilayah Kabupaten Lombok Timur bergerak ke arah timur dan barat serta merambat ke arah utara dan selatan. Perkembangan yang demikian secara spasial cukup menguntungkan karena berbagai fasilitas pelayanan yang ada dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hanya saja perkembangan fisik wilayah ke arah utara terutama yang bergerak ke arah Taman Nasional Gunung Rinjani dan hutan lindung perlu dibatasi agar dalam jangka panjang tidak akan mengganggu fungsi utama wilayah tersebut sebagai kawasan lindung yang akan menjaga kelangsungan ekosistem kehidupan di Kabupaten Lombok Timur.

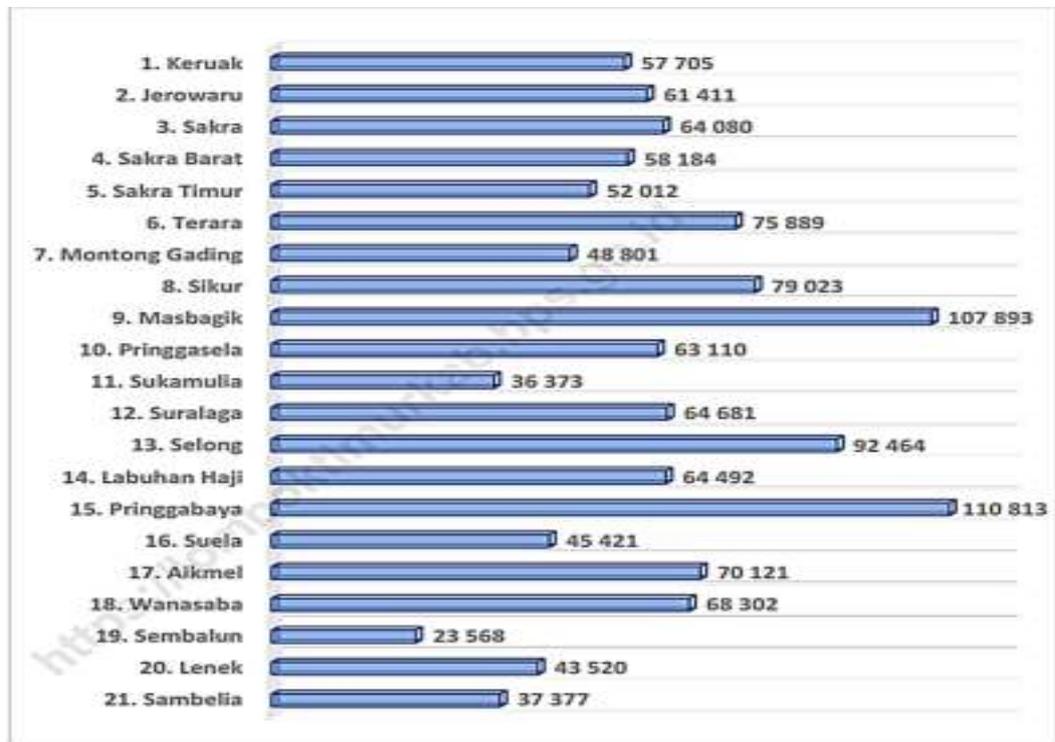
1.4. Kondisi Demografis Kabupaten Lombok Timur

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kabupaten Lombok Timur selama ini menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 September, jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 sebesar 1.325,2 ribu jiwa dengan pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 sebesar 1,77 persen. Rasio Jenis Kelamin sebesar 99 dan kepadatan penduduk sebesar 825 penduduk per km².

Jumlah angkatan kerja di tahun 2020 sebesar 608.192 orang, yang terdiri dari angkatan kerja laki-laki berjumlah 338.178 orang dan tenaga kerja perempuan sebesar 270.014 orang. Angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 sebesar 4,17 persen. Angka ini meningkat 0,7 persen terhadap tahun sebelumnya. Jika berdasarkan jenis kelamin, angka pengangguran perempuan lebih kecil dibanding angka pengangguran laki-laki

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur tahun 2020.



Sumber/Source: Hasil SP2020 (September)/The result of the 2020 Population Census (September)

Pada tahun 2019 Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.296.765 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,5 % atau menurun bila dibandingkan dengan tahun 2018 dengan laju pertumbuhan 0,6 %.

Tabel 1.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Lombok Timur, 2019 dan 2020.

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates (NPR)		Angka Partisipasi Kasar (APK) Gross Participation Rates (GPR)	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD/MI/ Sederajat Primary School	98,29	98,11	107,00	105,68
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	81,50	81,78	89,42	90,22
SMA/SMK/MA/ Sederajat Upper Secondary School	64,37	67,28	89,42	89,56

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

Bila dilihat tabel di atas, Pada tahun 2020 Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI di Kabupaten Lombok Timur 98,11 persen atau menurun 0,18 persen dari tahun 2019. APM SMP/MTS tahun 2020 yaitu 81,78 persen atau meningkat 0,28 persen dari tahun 2019. Sementara itu, APM SMA/MA tahun 2020 yaitu 67,28 persen atau eningkat 2,91 persen dari tahun 2019. Meningkatnya APM pada jenjang sekolah menengah terutama sekolah menengah atas ini menunjukkan masyarakat semakin peduli pada pentingnya pendidikan tinggi.

1.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Timur

Tujuan pembangunan ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat yang tercermin pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan terwujud apabila nilai tambah total yang tercipta dari aktivitas kegiatan ekonomi meningkat. Nilai tambah yang tercipta dari aktivitas kegiatan ekonomi di Lombok Timur dapat dilihat dari PDRB. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya dalam menciptakan nilai tambah, hal ini dikarenakan PDRB memuat informasi tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan kontribusi sektor – sektor ekonomi daerah.

Pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perubahan volume produksi barang dan jasa dan perubahan harga, dalam hal ini peningkatan volume PDRB tidak selalu mengindikasikan perubahan kearah yang lebih baik, karena peningkatan tersebut masih mengandung factor inflasi yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dapat dijadikan indikator perkembangan volume produksi barang dan jasa tanpa disertai pengaruh perubahan harga. Indikator tersebut kerap dijadikan sebagai alat untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan cermin kinerja prekonomian wilayah dan ukuran sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, indikator ini dapat dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang

Menelaah data PDRB pembangunan bidang ekonomi setiap tahun mengalami perkembangan yang cukup bagus. Nilai PDRB yang telah dicapai Lombok Timur menunjukkan perkembangan yang dinamis hingga mampu menghasilkan nilai tambah yang terus meningkat.

Di tengah kondisi terjadinya wabah penyakit menular (pandemic COVID-19) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung pesimis, perekonomian Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur mengalami penurunan sebesar -3,10 persen karena lesunya aktivitas perekonomian akibat pandemi covid 19 yang berkepanjangan.

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2020 mencapai 20.026,11 miliar rupiah. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 287,5 miliar rupiah dari tahun 2019 yang bernilai 20.313,61 miliar rupiah.

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi masing masing kategori terhadap PDRB. PDRB Lombok Timur menunjukkan bahwa kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB. Pada tahun 2019, sekitar 27,04 persen. Pada tahun 2020, sekitar 27,89 persen PDRB Lombok Timur berasal dari kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Persentase ini meningkat dari tahun 2019 yaitu sekitar 27,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 kecenderungan penduduk Lombok Timur untuk beralih ke sektor pertanian meningkat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur pada 2019 yaitu sebesar 4,68 persen dimana sektor yang mengalami pertumbuhan paling besar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 10,52 persen. Sedangkan menurut BPS Kabupaten Lombok Timur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur pada 2020 yaitu sebesar -3,10 persen karena adanya situasi pandemi yang menyebabkan lesunya aktivitas perekonomian. Namun, ada satu sektor yang memiliki pertumbuhan sangat tinggi dibanding tahun 2019 yaitu sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh 13,12 persen. Hal ini dapat disebabkan tingginya penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi selama masa pandemi

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Lombok Timur pada periode 2016-2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

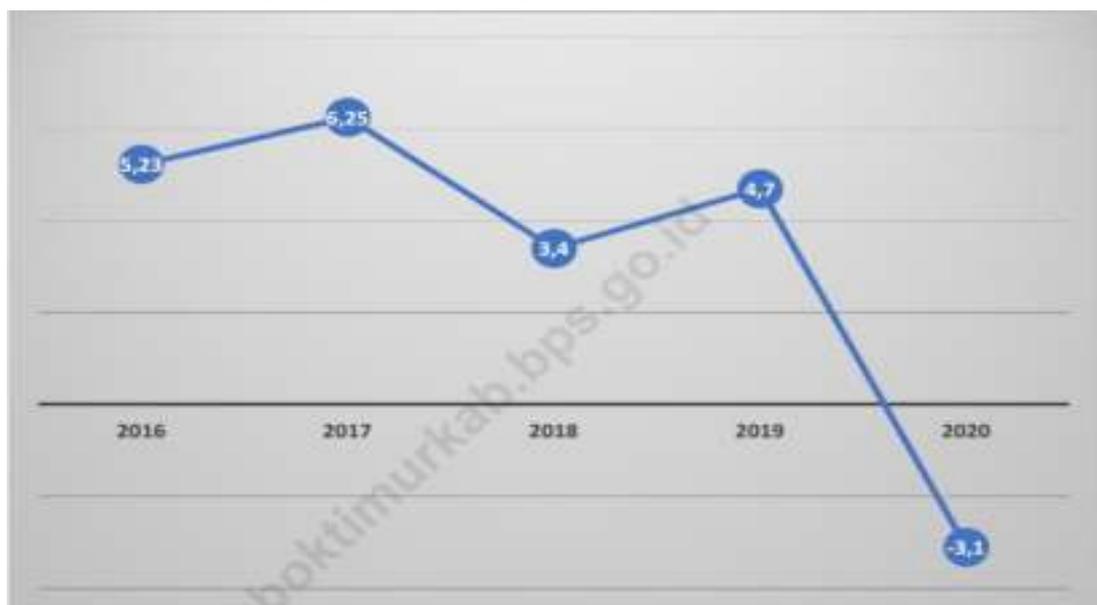
Tabel 1.4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Lombok Timur (miliar rupiah), 2016–2020



Sumber/Source : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Tabel 1.5. PDRB atas dasar harga konstan (persen) menurut pengeluaran Kabupaten Lombok Timur 2016 – 2020



Sumber/Source : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Lombok Timur meningkat, yakni sebesar 5,23 persen (2016); 6,25 persen (2017); dan 3,4 persen (2018) dan 4,7 persen (2019) dan menurun -3,1 persen tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur secara rata-rata di atas 5 persen. Namun pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dengan pertumbuhan 3,36 persen namun di tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 4,68 % dan menurun Kembali -3,1 % tahun 2020 akibat dari Pandemi covid 19 yang berkepanjangan.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur adalah mencakup sejauh mana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mampu merealisasikan sasaran strategis atau sasaran kinerja utama yang telah ditargetkan dalam tahun 2022 serta sasaran kinerja pada masing – masing jenjang yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala Bidang dan Perjanjian kerja antara Kepala Bidang dengan jabatan yang ada di bawahnya.

Dalam Lakip ini dibahas tentang Perencanaan dan Perjanjian Kinerja termasuk didalamnya rencana strategik dan Rencana Kinerja Tahun 2022 serta Akuntabilitas kinerja yang mencakup pencapaian kinerja utama, analisis akuntabilitas kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Guna mewujudkan peran pembangunan peternakan yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan penjabaran tugas pokok dan fungsinya selalu berlandaskan partisipasi masyarakat dan mengedepankan perencanaan yang strategis karena perencanaan dipandang sebagai tolok keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan.

Rencana strategis yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini perencanaan strategis merupakan rencana jangka menengah yang secara fungsional mempunyai posisi strategis karena selain merupakan acuan teknis, juga merupakan media yang menjembatani semangat perencanaan jangka panjang dengan perencanaan jangka pendek dan dapat menjadi motivasi dalam mewujudkan sasaran.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah : (1) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan / rencana operasional bidang peternakan ; (2) Sebagai batasan dan bahan untuk merumuskan rencana yang akan dilaksanakan serta menetapkan target – target yang ingin dicapai sesuai kondisi internal dan eksternal ; (3) Sebagai batasan penilaian atasan terhadap pelaksanaan wewenang yang diberikan di bidang peternakan.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu produk Peternakan dengan mengembangkan Usaha Agribisnis yang berdaya saing dan terintegrasi antara hulu sampai hilir ; mendorong peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner ; mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara peternak dengan pelaku usaha

agribisnis dan mengembangkan teknologi peternakan yang ramah lingkungan dan sesuai kearifan lokal.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan melalui peningkatan produksi komoditi peternakan unggulan daerah dalam hal ini produksi ternak sapi.

2.3. Cara pencapaian tujuan dan sasaran

1. Memantapkan ketahanan pangan dengan menjamin ketersediaan daging melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan.
2. Memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pembangunan Infrastruktur peternakan, bantuan pemerintah kepada kelompok tani baik berupa bibit ternak maupun sarana peternakan lainnya.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur peternakan, penataan regulasi bidang peternakan.
4. Penguatan akses petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar dan permodalan seperti kredit usaha rakyat.
5. Mendorong minat investasi peternakan dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.
6. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian penyakit hewan secara terpadu.
7. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan peternakan yang akuntabel dan *good governance*.
8. Mengembangkan Peternakan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan mulai dari proses penggunaan input produksi, proses budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan hasil sampai kepada pemasaran hasil peternakan.
9. Mengembangkan agribisnis peternakan dengan membangun akses permodalan bagi petani melalui Kredit Usaha Rakyat tanpa bunga atau mengembangkan usaha dengan pola syariah.

2.1. Prioritas pembangunan tahun 2022

Pada tahun 2022 prioritas pembangunan peternakan adalah diarahkan untuk mendukung peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak melalui :

- Pengembangan ternak sapi potong dan ternak sapi bibit,
- Pengembangan inseminasi buatan dengan mendukung program prioritas nasional yaitu SIKOMANDAN yang dicanangkan oleh pemerintah pusat;

- Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak baik penyakit ternak yang bersifat zoonosis maupun penyakit ternak yang tidak bersifat zoonosis dengan vaksinasi dan pengobatan.
- Perlindungan petani dari kerugian usaha tani melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau baik karena bencana alam, pencurian maupun kematian ternak.
- Penataan kemitraan Usaha di bidang perunggasan melalui perbaikan pola kemitraan usaha.
- Pengawasan dan pengendalian produk hewan (daging, susu dan telur) dan pemotongan ternak betina produktif.
- Dalam pengembangan teknologi peternakan diarahkan untuk pengadaan sarana IB, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan tenaga inseminator dan penyebaran pakan/ransum ternak ruminansia berkualitas.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam Rencana Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Peternakan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD 2018 – 2023 dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2022 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di tandatangani antara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dengan Bupati Lombok Timur pada bulan Januari 2022.

Dalam perjanjian kinerja tersebut ditetapkan sasaran pokok yang ingin dicapai dalam tahun 2022 dengan 02 (satu) indikator kinerja terkait dengan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indikator Kinerja Utama Tujuan : Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Peternakan	Peningkatan Populasi Ternak (Unit Ternak) sebesar 5 % per tahun	Jumlah Populasi ternak tahun 2022 berdasarkan hasil update data populasi ternak untuk semua jenis ternak yang dikonversi kedalam satuan unit ternak	221.320	165.622
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk peternakan	Peningkatan Produksi Daging Komoditi Peternakan Unggulan Daerah (Ton)	Populasi Ternak Sapi sebagai komoditi unggulan tahun 2022 x 127 kg (parameter rata2 berat karkas ternak Sapi dari populasi) /1000	20.038,95	20.117,4

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2022

2.3. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan kinerja organisasi yang telah diperjanjikan dalam tahun 2022 antara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala Bidang, Sekretaris dan antara Kepala Bidang dengan Sub Koordinator, maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 berdasarkan APBD Perubahan 2022, dikemas dalam 05 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan dengan Total Anggaran yang dikelola sebesar Rp. 31.876.124.723.- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) yang direncanakan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rencana Indikator Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran
1	2	3	4	5	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				35.028.819.012

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran
1	2	3	4	5	7
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				35.028.819.012
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Layanan Adminstrasi Perkantoran	Persen	100	11.513.425.012
1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Persen	100	13.178.000
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5.222.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.956.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	8.360.018.312
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	102	8.109.098.672
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	245.243.840
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	2	2.549.800

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran
1	2	3	4	5	7
		Keuangan Akhir Tahun SKPD			
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	3.126.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	56.373.000
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	56.373.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	Persen	100	72.714.250
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	3.125.000
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	16.871.250
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	2.785.000
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	150	6.056.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran
1	2	3	4	5	7
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	275	1.620.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	42.257.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	65.300.000
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100	30.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	.300.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realiasi Jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	Persen	100	50.559.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.080.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	35.700.000
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.200.000
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	20	7.579.000

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran
1	2	3	4	5	7
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	2.895.282.450
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	32	66.852.200
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	10.000.000
c	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2.818.430.250
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentasi rata - rata pertumbuhan populasi ternak per Tahun	Persen	5	18.335.349.500
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur	jenis	10	16.676.123.000
a	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	2	16.612.795.000
b	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1	63.328.000

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran
1	2	3	4	5	7
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	peternak	13.000	42.550.000
a	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	12	42.550.000
3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak	Kegiatan	2	1.616.676.500
a	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	125	1.589.345.500
b	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	12	27.331.000
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		%	15	3.229.355.000
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun	Unit	14	3.229.355.000
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	839.125.000
b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10	2.390.230.000

No	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran
1	2	3	4	5	7
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase terjaminnya kehatan hewan dan kehatan masyarakat veteriner dari PHM	Persen	100	1.940.689.500
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis pertahun	Persen	2	422.277.600
a	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12	422.277.600
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pegeluaran ternak	Kali	55	70.486.600
a	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	70.486.600
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambilan sampel per populasi	Persen	1	500.000.000
a	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan		
b	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	500.000.000
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Orang	50	847.697.300

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran
1	2	3	4	5	7
	Kesehatan Masyarakat Veteriner				
a	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	817.577.300
b	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	30.120.000
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH	ekor	12.000	100.228.000
a	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	10	100.228.000
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan ijin baru	Unit	23	10.000.000
1	Penerbitan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan yang legal	Unit	23	10.000.000
a	Penatausahaan Penerbitan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Ijin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	12	10.000.000
	JUMLAH TOTAL				35.028.819.012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksudkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Keswan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Utama
2. Pengukuran Kinerja Utama;
3. Aspek Keuangan;
4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- | | |
|------------|--------------|
| ❖ 90 - 100 | = Amat baik |
| ❖ 80 - 89 | = Baik |
| ❖ 50 - 79 | = Cukup baik |
| ❖ < 49 | = Kurang |

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2022 dari rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur periode 2018 – 2023 sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi teknis di Bidang

Peternakan bahwa realisasi pelaksanaan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dengan dua Indikator Utama sesuai SK IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perjanjian Kinerja Kepala OPD tahun 2022 yaitu (1) Peningkatan Populasi Ternak (Unit Ternak) sebesar 5 % per tahun dan (2) Indikator Peningkatan Produksi Daging Komoditi Peternakan Unggulan Daerah (Ton) dalam hal ini menggunakan barometer Penambahan Populasi ternak Besar, Kecil dan Ungas serta peningkatan produksi ternak sapi sebagai komoditi unggulan Sub Sektor Peternakan Kabupaten Lombok Timur dengan target sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Capaian indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indikator Kinerja Utama Tujuan : Meningkatkan Produksi dan Produkti-vitas komoditi Peternakan	Peningkatan Populasi Ternak (Unit Ternak) sebesar 5 % per tahun	Jumlah Populasi ternak tahun 2022 berdasarkan hasil update data populasi ternak untuk semua jenis ternak yang dikonversi kedalam satuan unit ternak	221.320	165.622	164.935	99,58
2	Sasaran : Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk peternakan	Peningkatan Produksi Daging Komoditi Peternakan Unggulan Daerah (Ton)	Populasi Ternak Sapi sebagai komoditi unggulan tahun 2022 x 127 kg (parameter rata2 berat karkas ternak Sapi dari populasi) /1000	20.038,95	20.117,4	16.014,3	79,60

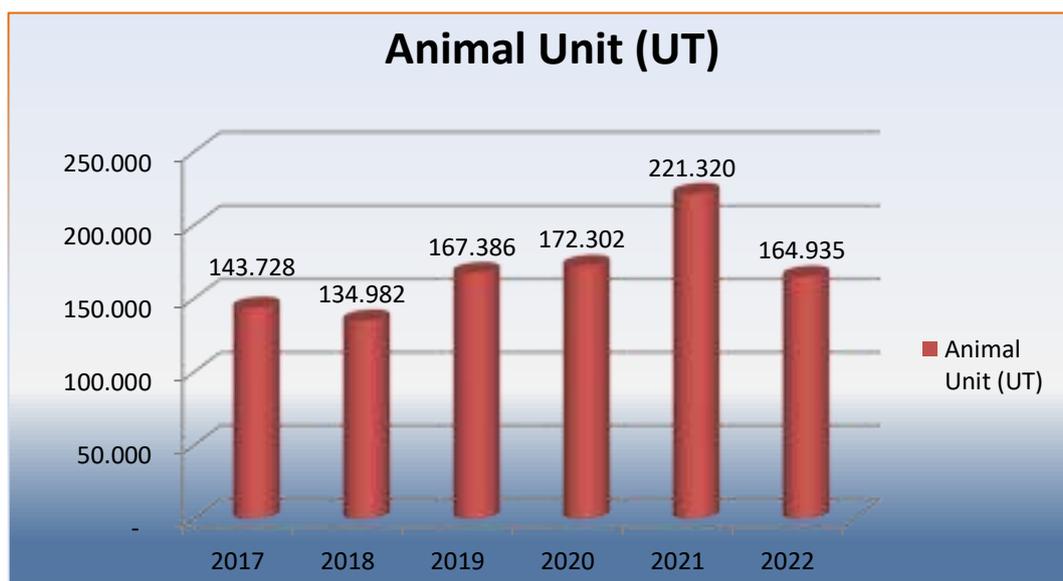
Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yang harus dicapai selama kurun waktu lima tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dengan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur. Pada Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Pada Indikator Kinerja Utama dengan Tujuan Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Peternakan dengan Indikator Kinerja Peningkatan populasi ternak tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 165.622 Unit Ternak terealisasi sebesar 164.934,5 Unit Ternak atau 99,58 %. Hal ini lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 221.320 Unit Ternak (135,78 %) dari target sebesar 162.995 Unit Ternak.

Tidak tercapainya target populasi ternak disebabkan telah terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku dua yaitu Sapi, Kerbau dan kambing. Populasi ternak Sapi pada tahun 2021 sebesar 157.787 ekor sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 126.097 ekor atau menurun sebesar 20,08 %. Demikian juga dengan ternak kerbau terjadi penurunan populasi sebesar 7,70 % yaitu dari 4.911 ekor pada tahun 2021 menjadi 4.533 ekor tahun 2022 dan ternak kambing dari 96.615 ekor menjadi 88.590 ekor atau turun 8,31 %.

Grafik 3.2. Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 – 2022.



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lombok Timur (2023)

Terhadap capaian kinerja tahun 2022 sebesar 221.320 Unit Ternak dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 164.935 Unit Ternak maka dapat dijelaskan bahwa rata – rata populasi ternak di Kabupaten Lombok Timur mengalami penurunan baik ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Unggas, dimana penurunan populasi mencapai 25,45 % dan penurunan terbesar terjadi pada populasi ternak ayam potong dari 5.500.572 ekor tahun 2021 menjadi 2.992.508 ekor tahun 2022.

Tabel 3.1. Populasi Terank Besar, Kecil dan Unggas di Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 – 2022

No.	Tahun	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	A. Buras	A. Ras	Itik
1	2017	130.890	2.931	3.413	96.013	13.427	1.471.133	3.190.830	120.000
2	2018	132.848	3.244	4.144	99.047	13.620	1.574.334	3.309.967	126.395
3	2019	139.063	4.739	3.798	89.026	10.160	1.488.996	7.380.856	140.339
4	2020	146.454	4.960	3.501	91.229	10.126	1.606.542	9.201.952	148.605
5	2021	157.787	4.911	3.630	96.615	9.972	1.624.236	6.026.890	320.881
6	2022	126.097	4.533	2.178	88.590	8.027	1.417.488	3.466.208	94.991
Jml penurunan		31.690	378	1.452	8.025	1.945	206.748	2.560.682	225.890
Persen turun		20,08	7,70	40,00	8,31	19,50	12,73	42,49	70,40

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lombok Timur (2023)

Pada pencapaian sasaran *peningkatan produksi daging komoditi unggulan peternakan* berupa produksi daging sapi yang ditargetkan tahun 2022 sebesar 20.117,4 Ton terealisasi sebesar 16.014,3 Ton atau mencapai 79,60 %. Hal ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 20.038,95 Ton maka terjadi penurunan produksi daging sapi.

Grafik 3.3. Produksi daging ternak Sapi tahun 2017 – 2022 di Kabupaten Lombok Timur



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Tahun 2023

Penurunan produksi tentunya sangat berdampak kepada tingkat konsumsi masyarakat, hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang tidak berani mengkonsumsi daging terutama daging sapi karena banyaknya ternak yang dipotong paksa oleh jagal dalam kondisi sakit akibat terjangkit penyakit PMK.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 produksi daging sapi terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya populasi ternak sebesar 17.661,00 Ton tahun 2019 dan 18.599.66 Ton tahun 2020 kemudian menjadi 20.038,95 Ton tahun 2021 artinya terjadi kenaikan sebesar 7,74 % dan berbanding terbalik dengan tahun 2022 yang mengalami penurunan yang sangat drastis.

Beberapa faktor yang mendorong dan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan produksi daging tahun 2022 selain wabah PMK antara lain rendahnya daya beli masyarakat yang dipicu oleh kenaikan harga BBM, adanya ketakutan masyarakat untuk mengkonsumsi daging sapi/kerbau akibat wabah PMK, Produktivitas ternak menurun karena banyaknya sapi/kerbau betina bunting yang mengalami abortus, harga ternak yang sakit sangat murah dan harga ternak yang sehat sangat mahal dan lalu lintas ternak dari dan keluar Kabupaten Lombok Timur di tutup sejak bulan April sampai dengan Desember 2022, kandang – kandang masyarakat yang memelihara ternak secara kolektif di tutup serta Program Inseminasi Buatan (IB) selama wabah PMK di hentikan.

Untuk menanggulangi dampak penyebaran PMK maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian dan Menteri Koordinator Perekonomian membentuk Satgas penanganan PMK dari tingkat Pusat sampai dengan Kabupaten/Kota dan melakukan Vaksinasi serta pengobatan secara massal di seluruh Indonesia dengan melibatkan petugas Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner di setiap Kabupaten/Kota bahkan sampai ke tingkat Desa.

Berkat koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Lombok Timur, maka pada akhir bulan September 2022 kasus PMK di Kabupaten Lombok Timur mulai melandai bahkan sampai dengan Desember 2022 tidak ada lagi penambahan kasus baru PMK sehingga Pemerintah Daerah mengambil kebijakan sejak bulan Oktober 2022 membuka kembali aktivitas pasar ternak, kandang kelompok, Kegiatan IB dan proses tender pengadaan ternak tahun 2022.

Dengan demikian, pencapaian indikator Peningkatan Populasi Ternak sebesar 5 % dan Peningkatan produksi daging komoditi peternakan unggulan daerah tahun 2022 tidak dapat mencapai target karena adanya kejadian luar biasa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Capaian indikator sasaran utama di atas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan masih cukup baik

bahkan baik walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan dengan interpretasi nilai 79 – 90 %.

3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

Pada tataran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian perjanjian kerja antara kepala dinas dengan kepala bidang dan antara kepala bidang dengan kepala Sub Koordinator/Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat 5 program dan 17 kegiatan serta 32 Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pelaksanaan sasaran kinerja utama yang diperjanjikan antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022, dengan capaian indikator kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

Nb	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th 2021	
			Satuan	K	Rp.	K	(Rp.)	K	Rp.
1									
	URLSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				35.028.819.012	-	31.876.124.723	95,96	91,00
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				35.028.819.012	-	31.876.124.723	95,96	91,00
I	PROGRAM PENUNJANG URLSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Layanan Adminstrasi Perkantoran	Persen	100	11.513.425.012	101,86	11.274.446.623	101,86	97,92
1	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Persen	100	13.178.000	98,10	12.928.000	98,10	98,10
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5.222.000	4,00	5.222.000	100,0	100,00

Nb	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th 2021	
			Satuan	K	Rp.	K	(Rp.)	K	Rp.
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	7.956.000	5,00	7.706.000	100,06	96,86
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	%	100	8.360.018.312	98,19	8.208.467.083	98,19	98,19
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bu lan	102	8.109.098.672	100,00	7.957.570.243	98,13	98,13
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	245.243.840	12,00	245.243.840	100,00	100,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2.549.800	1,98	2.527.000	99,11	99,11
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Laporan	16	3.126.000	16,00	3.126.000	100,00	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	56.373.000	100,00	56.373.000	100,00	100,00
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	56.373.000	4,00	56.373.000	100,00	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	Persen	100	72.714.250	66,38	48.267.220	66,38	66,38

Nb	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th 2021	
			Satuan	K	Rp.	K	(Rp.)	K	Rp.
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	3.125.000	10,00	3.125.000	100,00	100,00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	16.871.250	29,89	16.812.050	99,65	99,65
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	2.785.000	19,79	2.756.000	98,96	98,96
d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	150	6.056.000	149,36	6.030.200	99,57	99,57
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	275	1.620.000	275,00	1.620.000	100,00	100,00
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	42.257.000	4,24	17.923.970	42,42	42,42
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uhusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	65.300.000	99,95	65.267.500	99,95	99,95
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100	30.000.000	99,90	29.970.000	99,90	99,90
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35.300.000	5,00	35.297.500	99,99	99,99
6	Penyediaan Jasa Penunjang Uhusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realiasi Jasa penunjang Uhusan pemerintah daerah	Persen	100	50.559.000	70,25	35.516.563	70,25	70,25
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.080.000	11,94	2.069.000	99,47	99,47
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	35.700.000	6,95	20.668.563	57,90	57,90

Nb	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th 2021	
			Satuan	K	Rp.	K	(Rp.)	K	Rp.
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5	5.200.000	5,00	5.200.000	100,00	100,00
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	20	7.579.000	20,00	7.579.000	100,00	100,00
7	Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pereliharaan barang milik daerah	Persen	100	2.895.282.450	118,09	2.847.627.257	118,09	98,35
a	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Uhit	32	66.852.200	29,98	62.633.025	93,69	93,69
b	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Uhit	30	10.000.000	14,25	4.750.000	47,50	47,50
c	Perawatan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Uhit	4	2.818.430.250	3,95	2.780.244.232	98,65	98,65
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase rata - rata pertumbuhan populasi ternak per Tahun	%	5	18.335.349.500	5,05	16.196.025.200	101,09	88,33
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur	jenis	10	16.676.123.000	10,00	14.596.022.700	100,00	87,53

Nb	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th 2021	
			Satuan	K	Rp.	K	(Rp.)	K	Rp.
a	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewari/Tanaman	Jumlah SDG Hewari/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	WUB	2	16.612.795.000	2,00	14.532.698.700	100,00	87,48
b	Peningkatan Kualitas SDG Hewari/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewari/Tanaman	Dokumen	1	63.328.000	1,00	63.324.000	99,99	99,99
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	peternak	13.000	42.550.000	13.000,00	42.550.000	100,00	100,00
a	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana man Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil	Laporan	12	42.550.000	12,00	42.550.000	100,00	100,00
3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hujan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak	Kegiatan	2	1.616.676.500	2,00	1.557.452.500	100,00	96,34
a	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hujan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hujan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	125	1.589.345.500	140,52	1.532.401.500	112,42	96,42
b	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	12	27.331.000	11,00	25.051.000	91,66	91,66
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun	%	15	3.229.355.000	15,00	2.904.650.800	100,00	89,95
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun	Unit	14	3.229.355.000	14,00	2.904.650.800	100,00	89,95

Nb	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th 2021	
			Satuan	K	Rp.	K	(Rp.)	K	Rp.
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	839.125.000	1,00	830.508.800	100,00	98,97
b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10	2.390.230.000	10,00	2.074.142.000	100,00	86,78
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase terjaminnya kehatan hewan dan kehatan masyarakat veteriner dari FHM	Persen	100	1.940.689.500	76,83	1.491.042.100	76,83	76,83
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis pertahun	Persen	2	422.271.600	2,00	422.260.800	100,00	100,00
a	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	12	422.271.600	12,00	422.260.800	100,00	100,00
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pegeluaran temak	Kali	55	70.486.600	63,14	70.486.600	114,80	100,00
a	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	70.486.600	12,00	70.486.600	100,00	100,00
3	Pengediaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambilan sampel per populasi	Persen	1	500.000.000	1,01	499.908.500	100,98	99,98
a	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan			-	-	-	-

Nb	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja dan Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th 2021	
			Satuan	K	Rp.	K	(Rp.)	K	Rp.
b	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	12	500.000.000	12,00	499.908.500	99,98	99,98
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Orang	50	847.697.300	23,48	398.158.200	46,97	46,97
a	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	817.577.300	5,40	368.038.200	45,02	45,02
b	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	30.120.000	12,00	30.120.000	100,00	100,00
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan temak tercatat di RPH/TPH	ekor	12000	100.228.000	12.000,00	100.228.000	100,00	100,00
a	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	10	100.228.000	10,00	100.228.000	100,00	100,00
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan ijin baru	Unit	23	10.000.000	23,00	9.960.000	100,00	99,60
1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Ebit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan yang legal	Unit	23	10.000.000	23,00	9.960.000	100,00	99,60
a	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Ebit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Ebit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	12	10.000.000	11,98	9.960.000	99,80	99,60
	JUMLAH TOTAL				35.028.819.012	-	31.876.124.723	95,96	91,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Lotim 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini terdiri dari 7 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan yang menunjang pelaksanaan program utama pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase capaian layanan Administrasi Perkantoran yang ditargetkan sebesar 100 persen sasaran utama adalah berfungsinya secara optimal sarana dan prasarana peternakan dan optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan laporan kinerja bulanan, triwulan maupun tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dan dalam tataran pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dalam bentuk penyusunan Renja tahun 2022, perubahan dokumen renstra OPD dan penyusunan Dokumen rencana anggaran, penyusunan laporan kinerja keuangan dan anggaran telah berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian juga dengan kegiatan dan Sub Kegiatan lain dalam program penunjang ini Secara umum program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sangat mendukung dalam penyediaan layanan perkantoran dan penyediaan prasarana dan sarana perkantoran dengan capaian 100 % dari target 100 % tahun 2022.

Adanya Sub kegiatan yang tidak mencapai target pada program ini seperti Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lebih disebabkan karena penyelenggaraan rapat rapat keluar daerah dapat dilaksanakan secara daring sehingga menghemat anggaran, Demikian juga dengan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik secara fisik telah terealisasi 100 persen, dimana pembayarannya di bebaskan kepada masing – masing UPT Kecamatan.

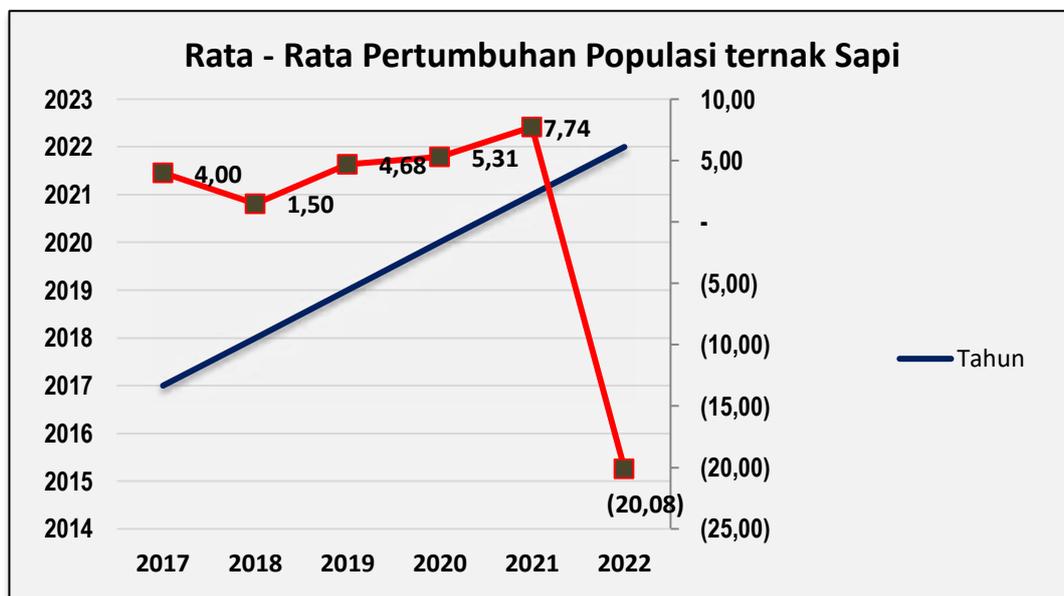
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian merupakan prioritas utama dalam mengemban misi peternakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 yaitu meningkatkan Populasi Ternak dan Peningkatan produksi komoditi peternakan unggulan daerah untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal.

Target kinerja program ini yaitu Persentasi rata - rata pertumbuhan populasi

ternak per tahun adalah 5 persen terutama ternak sapi sebagai komoditi unggulan daerah dan target kinerja ini tidak dapat tercapai, dimana pertumbuhan populasi ternak tahun 2022 minus 20,08 % hal ini disebabkan oleh wabah penyakit hewan menular yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak berkuku dua seperti Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba.

Grafik 3.4 Pertumbuhan Populasi ternak sapi tahun 2017 – 2022 di Kabupaten Lombok Timur



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lombok Timur 2023

Wabah penyakit PMK telah berdampak luas terhadap pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Lombok Timur khususnya seperti pendistribusian bibit ternak yang direncanakan bulan Juni 2022 di undur menjadi bulan Oktober – Desember 2022. Demikian juga dengan pelaksanaan Program SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditi Andalan Negeri) dari Pemerintah Pusat ditunda sejak April – September 2022 dan baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 bersamaan dengan kegiatan vaksinasi PMK dan penandaan ternak Sapi dan Kerbau.

Pada tahun 2022 melalui kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota telah di distribusikan bibit ternak sebanyak 815 Unit ternak dengan berbagai jenis ternak seperti Sapi Bibit, Sapi Bakalan, Sapi indukan Bali, Sapi Persilangan, Ternak Kambing, Ayam dan itik sebanyak 10 jenis paket ternak sesuai dengan target kegiatan ini.

Realisasi Pelaksanaan kegiatan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3. Realisasi distribusi ternak tahun 2022

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1.	Sapi Bakalan	91
2.	Sapi Bibit	348
3.	Sapi Eksotik	95
4.	Sapi Indukan	68
	JUMLAH	602
5.	Kambing Batang	227
6.	Kambing Boer	10
7.	Kambing PE	58
	JUMLAH	295
8.	Ayam Petelur	12.091
9.	Ayam Pedaging	700
10.	Itik Petelur	1.192
	JUMLAH	13.983

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2022

Selain Pejaminan kemurnian SDG ternak maka yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama adalah peningkatan kelahiran ternak melalui program prioritas nasional yaitu SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditi Andalan Negeri). Dalam mendukung program tersebut, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengadakan 5.000 Dosis straw Sapi persilangan sedangkan pemerintah pusat menyediakan N2 cair, straw Sapi Bali dan Sebagian Straw sapi persilangan yang ditargetkan sebanyak 28.149 dosis.



Realiasi pelaksanaan fisik kegiatan ini telah mencapai 100 % dengan realiasi Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 42.322 Dosis atau 150,34 % dan tingkat kelahiran ternak hasil IB sebanyak 22.926 ekor.

Pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota telah di distribusikan pakan ternak unggas sebanyak 90,90 ton kepada 15 kelompok peternak.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 sub kegiatan. Target kinerja Program ini adalah Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun yaitu sebesar 15 % hal ini dapat dicapai yaitu dengan membangun 16 unit prasarana peternakan baik berupa kandang ternak maupun rehabilitasi prasarana perkantoran dari dua sub kegiatan tersebut dimana Rumah Potong Hewan yang dibangun/direhabilitasi tahun ini sebanyak 1 unit yaitu RPH Apitaik Kecamatan Pringgabaya dan pada sub kegiatan pembangunan sarana pertanian lainnya telah dibangun dan direnovasi sebanyak 15 Unit kandang ternak Ayam dan Kambing yang berlokasi di 15 Kecamatan.



Penyediaan anggaran untuk program ini berasal dari APBD Kabupaten Lombok Timur dan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 3.229.355.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.904.650.800,- atau sebesar 89,94 %. Adanya paket pekerjaan yang tidak terealisasi karena keterbatasan APBD dan akan dibayarkan tahun 2023.

Dengan terbangunnya kandang ini maka pembangunan prasarana peternakan terus tumbuh lebih dari 15 % atau 40 % dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 18 unit dan tahun ini terbangun sebanyak 22 Unit prasarana peternakan.

Masih rendahnya realisasi anggaran disebabkan karena proses pelaksanaan fisik kegiatan yang dilakukan di perubahan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang belum terbayarkan keuangannya.

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sasaran pokok program ini adalah terkendalinya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ditargetkan sebesar 100 %. Dalam pelaksanaannya ditunjang oleh 5 kegiatan pokok yang meliputi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.



Pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak yang merupakan salah satu pintu masuknya penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis (menular ke manusia) terutama dari daerah lain seperti Pulau Jawa, Bali maupun dari Pulau

Sumbawa, dimana lalu lintas ternak ini intensitasnya sangat tinggi sehingga resiko penularan penyakit menjadi tinggi, maka salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan hewan di daerah perbatasan dengan memberikan rekomendasi status kesehatan hewan baik yang masuk maupun yang keluar Kabupaten Lombok Timur.

Program ini bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah berkembangnya berbagai penyakit menular (Zoonosis) pada ternak yang dapat mengganggu kesehatan ternak dan masyarakat veteriner, dalam bentuk pelayanan aktif, pelayanan semi aktif dan pelayanan pasif dengan target out put yang dihasilkan adalah terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari Penyakit Hewan Menular.

Indikator utama program ini adalah terjaminnya 100% kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari penyakit hewan menular yang strategis atau bersifat zoonosis (menular ke manusia) di Kabupaten Lombok Timur. Dalam tahun 2022 Kabupaten Lombok Timur termasuk Kabupaten yang masih bebas dari penyakit menular strategis seperti Anthrax, Brucellosis, Rabies dan Penyakit Ngorok (SE). Namun tidak dengan penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda beberapa Provinsi dan Kabupaten Di Indonesia dan termasuk Kabupaten Lombok Timur.

Terjadinya kejadian luar biasa penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak masyarakat yang berdampak kepada beberapa sektor kehidupan masyarakat terutama perubahan mental peternak yang menyebabkan trauma dalam memelihara ternak dan kerugian secara ekonomis.

Dalam pelaksanaan kegiatan terutama sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis telah dilakukan secara terstruktur mulai dari Pemerintah Pusat sampai di tingkat Desa dengan membentuk Satgas pengendalian PMK dan Alhamdulillah atas ijin Allah bahwa pengendalian melalui Vaksinasi Ternak



dan Pengobatan penyakit PMK telah berhasil dilakukan sehingga sampai akhir tahun 2022 Kabupaten Lombok Timur tidak ada lagi kasus baru PMK. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, telah ditingkatkan intensitas pengawasan lalulintas ternak yang masuk maupun keluar dari Lombok Timur sebanyak 63 kali melebihi target yang ditetapkan yaitu 55 kali bahkan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi yang menutup sementara sampai dengan akhir tahun 2022 pemasukan dan pengeluaran terna kantar pulau.

Pada kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang ditargetkan sebanyak 50 orang pelaku usaha hanya dapat direalisasikan sebanyak 24 orang pelaku usaha hal disebabkan karena masih rendahnya daya beli masyarakat dan dampak dari wabah PMK.

Dampak wabah PMK ini juga telah menyebabkan tertundanya realiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau sehingga pada sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target dari 12 laporan kegiatan hanya terealisasi 50 %.

Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana puskesmas, obat – obatan ternak yang dibutuhkan oleh masyarakat selama 1 tahun dan terpeliharanya Kabupaten Lombok Timur dari ancaman Penyakit Hewan menular (zoonosis); terciptanya keamanan pangan asal hewan yang ASUH (aman sehat utuh dan halal) yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Ketahanan Pangan tahun 2022 sebesar Rp. 500.000.000,- yang digunakan untuk pengadaan obat – obatan ternak, operasional pelayanan Kesehatan hewan, rapat koordinasi dan lain – lain. Sampai dengan Desember tahun 2022 Pelayanan Kesehatan Hewan telah mencapai 52.222 ekor baik ternak besar, ternak kecil, Hewan kesayangan dan unggas dari target 12.000 ekor, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.4. Realisasi Pelayanan Kesehatan Ternak di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

Bulan	Ternak Besar (ekor)	Ternak Kecil (ekor)	Unggas (Ekor)	Hewan Kesayangan (ekor)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	1.171	6	5	276
Februari	2.669	29	800	456
Maret	2.621	25	1	624
April	2.867	70	0	415
Mei	4.709	235	0	36
Juni	4.398	475	0	7
Juli	12.550	289	0	46
Agustus	5.257	633	0	9
September	3.780	529	0	4
Oktober	3.936	278	0	16
November	1.561	294	0	3
Desember	770	360	0	12
Lombok Timur	46.289	3.223	806	1.904
2021	20.157	4.166	727	665
2020	17.319	4.417	4.228	1.326
2019	10.688	5.150	234	285
2018	9.328	7.168	348	135
2017	9.201	7.940	384	273
2016	7.612	5.469	293	39
2015	9.847	5.962	290	187

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan, 2023

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengurusan ijin usaha di bidang peternakan seperti Rekomendasi ijin Usaha Pemotongan Hewan, Rekomendasi Ijin Usaha Pemeliharaan Ternak, Pembangunan Kandang, Perusahaan Peternakan dan lain – lain.

Indikator utama program ini adalah ketersediaan Jumlah Unit usaha Peternakan yang legal yaitu sebanyak 22 Unit Usaha yang melakukan pengurusan ijin maupun perpanjangan ijin tahun 2022. Dinas Peternakan dan Kesehatan dalam hal hanya mengeluarkan rekomendasi sedangkan yang membuat atau menerbitkan perijinan dibawah Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Pada tahun 2022 jumlah perusahaan peternakan yang melakukan pengurusan ijin dan rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 3.5. Jumlah usaha pemotongan ternak yang mengurus rekomendasi tahun 2022

NO.	TEMPAT PEMOTONGAN (RPH/TPH)	NAMA JAGAL		KETERANGAN
1	RPH PANCOR	1	H. HERMAN	Aktif
		2	Hj. SALMIATUN	Aktif
		3	M. GAZALI	Aktif
		4	ABDUL RAUFUDIN	Aktif
2	RPH MASBAGIK	1	SARWANI	Aktif
		2	HARYATI	Aktif
		3	H. SUHIRMAN	Aktif
		4	H. ASMAI	Aktif
		5	SABRI	Aktif
3	RPH ANJANI	1	H. MUIS SULSIDDIQ	Aktif
		2	MAMAN SASTRAWAN	Aktif
4	RPH AIKMEL	1	H. HASBULLAH	Aktif
		2	H. ABDUL LATIF	Aktif
		3	H. SUHAIMI	Aktif
		4	M. TAMIMI	Aktif
		5	H. M. ZAINI	Aktif
		5	Hj. HALIMAH	Aktif
5	RPH APITAIK	1	SUPARMAN	Aktif
		2	RACHMAN ROSYDI	Aktif
6	RPH KOTARAJA	1	H. DANDI	Aktif
7	RPH RUMBUK	1	MAHSUN	Aktif
8	TPH PERESAK	1	H. HAERUMAN ABDULLAH	Aktif
		2	ACHMAD FAIZAL	Aktif
		3	ANWAR SADAT	Aktif
		4	AGUS SUPIANDI	Aktif
9	TPH GUNUNG RAJAK	1	H. ALIMUDIN	Aktif
		2	H. AZWAR ANAS	Aktif
10	TPH SIKUR	1	SELAMET JUNIADI	Aktif
12	TPH GERES	1	SAHABUDIN	Aktif
13	TPH SURADADI	1	SULAIMAN	Aktif
		3	FATHURRAHMAN	Aktif
		4	RUSDI	Aktif
14	TPH RARANG	1	SURIATI	Aktif
15	TPH JENGGIK	1	BQ. SAIDAH	Aktif
16	TPH KORLEKO	1	Hj. ZULIANA HIDAYAT	Aktif
18	TPH PRINGGABAYA	2	DURAHMAN	Aktif
19	TPH KERUMUT	1	WIRONATA	Aktif
20	TPH SAMBELIA	1	ZAINUDDIN	Aktif
		2	ROHANI BINTI SA'IM	Aktif
21	TPH DASAN LEKONG	1	L. JUMAWALDI	Aktif
		2	Hj. RAHMAH	Aktif

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2023

Pengurusan rekomendasi perpanjangan ijin jagal dari 54 usaha pemotongan ternak tahun 2022 yang masih aktif sebanyak 48 Usaha Pemotongan perorangan.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan proses penganggaran, sumber dana, penerimaan, pengeluaran keuangan dan pelaksanaan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur melaksanakan urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui program dan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi yang terdiri dari 5 (lima) program dan 27 (dua puluh delapan) kegiatan. Sebagai entitas akuntansi yang mengelola anggaran melaksanakan anggaran belanja sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2021. Rincian belanja per bidang kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Anggaran Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

Nb	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Anggaran (Rp) Rp.	Realisasi Anggaran (Rp) (Rp.)	% Rp.
1	2	3	4	5	5
	URUSAN PEMBERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		35.028.819.012	31.876.124.723	91,00
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		35.028.819.012	31.876.124.723	91,00
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Layanan Administrasi Perkantoran	11.513.425.012	11.274.446.623	97,92
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	13.178.000	12.928.000	98,10
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.222.000	5.222.000	100,00
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.956.000	7.706.000	96,86
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	8.360.018.312	8.208.467.083	98,19
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.109.098.672	7.957.570.243	98,13
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.243.840	245.243.840	100,00

Nb	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Anggaran (Rp.) Rp.	Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp.)	% Rp.
1	2	3	4	5	5
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.549.800	2.527.000	99,11
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.126.000	3.126.000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	56.373.000	56.373.000	100,00
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.373.000	56.373.000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	72.714.250	48.267.220	66,38
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.125.000	3.125.000	100,00
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16.871.250	16.812.050	99,65
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.785.000	2.756.000	98,96
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.056.000	6.030.200	99,57
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.620.000	1.620.000	100,00
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.257.000	17.923.970	42,42
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	65.300.000	65.267.500	99,95
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30.000.000	29.970.000	99,90
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35.300.000	35.297.500	99,99
6	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Jasa penunjang Usuan pemerintah daerah	50.559.000	35.516.563	70,25
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.080.000	2.069.000	99,47

Nb	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Anggaran (Rp.) Rp.	Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp.)	% Rp.
1	2	3	4	5	5
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35.700.000	20.668.563	57,90
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.200.000	5.200.000	100,00
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.579.000	7.579.000	100,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	2.895.282.450	2.847.627.257	98,35
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66.852.200	62.633.025	93,69
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10.000.000	4.750.000	47,50
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.818.430.250	2.780.244.232	98,65
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase rata - rata pertumbuhan populasi ternak per Tahun	18.335.349.500	16.196.025.200	88,33
1	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur	16.676.123.000	14.596.022.700	87,53
a	Penjarianan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	16.612.795.000	14.532.698.700	87,48
b	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	63.328.000	63.324.000	99,99
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Elbit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	42.550.000	42.550.000	100,00
a	Pengawasan Mutu Benih/Elbit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Elbit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	42.550.000	42.550.000	100,00
3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Elbit Ternak, dan Hjauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan ternak dan Registrasi ternak	1.616.676.500	1.557.452.500	96,34
a	Pengendalian Penyediaan Benih/Elbit Ternak dan Hjauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Elbit Ternak dan Hjauan Pakan Ternak yang Tersedia	1.589.345.500	1.532.401.500	96,42
b	Pengawasan Produksi Benih/Elbit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Elbit	27.331.000	25.051.000	91,66

Nb	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Anggaran (Rp.) Rp.	Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp.)	% Rp.
1	2	3	4	5	5
		Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana peternakan per tahun	3.229.355.000	2.904.650.800	89,95
1	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun	3.229.355.000	2.904.650.800	89,95
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	839.125.000	830.508.800	98,97
b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2.390.230.000	2.074.142.000	86,78
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	1.940.689.500	1.491.042.100	76,83
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis pertahun	422.271.600	422.260.800	100,00
a	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	422.271.600	422.260.800	100,00
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran ternak	70.486.600	70.486.600	100,00
a	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70.486.600	70.486.600	100,00
3	Pengadaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengambilan sampel per populasi	500.000.000	499.908.500	99,98
a	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		-	-
b	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	500.000.000	499.908.500	99,98
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	847.697.300	398.158.200	46,97
a	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	817.577.300	368.038.200	45,02
b	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30.120.000	30.120.000	100,00
5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH	100.228.000	100.228.000	100,00

Nb	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Anggaran (Rp.) Rp.	Realisasi Anggaran (Rp.) (Rp.)	% Rp.
1	2	3	4	5	5
a	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	100.228.000	.228.000	100,00
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan ijin baru	10.000.000	9.960.000	99,60
1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Ebit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Unit Usaha Hewan yang legal	10.000.000	9.960.000	99,60
a	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Ebit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Ebit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	10.000.000	9.960.000	99,60
	JUMLAH TOTAL		35.028.819.012	31.876.124.723	91,00

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Lotim 2023

Jumlah Anggaran Sumber Dana APBD yang dikelola langsung oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 35.028.819.012,00.- Jumlah tersebut terdiri atas Belanja tidak langsung sebesar Rp 8.109.098.672,00 ,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 26.919.720.340.- dengan Realiasi fisik sebesar 95,96 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.876.124.723,- (91,00 %) terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.957.570.243,- (98,13 %) dan Belanja Langsung Rp. 23.918.554.480,00 ,- (88,85 %).

Bila dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2021 senilai Rp. 31.885.082.947,00 dan terealisasi senilai Rp. 25.002.880.509,00 atau 78,42 %, maka dari sisi nilai anggaran terjadi peningkatan sebesar Rp. 3.143.736.065,00,- atau bertambah sebesar 9,85%. Berdasarkan kepada Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang tertera dalam perjanjian kinerja dimana penambahan ini disebabkan oleh Penambahan Pegawai ASN (P3K), Penambahan Bantuan Hibah Uang dan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Ketahanan Pangan Serta Program Bantuan sosial kepada masyarakat untuk mengatasi dampak covid -19.

Bila ditinjau dari sisi realisasi anggaran maka terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun lalu, dimana tahun 2021 telah direalisasikan anggaran sebesar 78,42 % sehingga ada anggaran yang dibayarkan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 91,00 % dan terdapat paket

pekerjaan yang tidak dapat direalisasikan tahun 2022 yang merupakan hutang kepada pihak ke 3 yang harus dianaggarakan kembali dalam tahun 2023.

Keterbatasan anggaran pembiayaan karena tidak tercapainya target pendapatan pemerintah daerah sehingga menyebabkan rendahnya realisasi keuangan kegiatan, sementara pelaksanaan kegiatan fisik telah mencapai 95,96 %. Selain itu, adanya beberapa kegiatan administrasi perkantoran dan Asuransi Ternak yang tidak dapat direalisasikan anggarannya sehingga berpengaruh terhadap ketercapaian fisik kegiatan 100 %.

Disamping adanya sub kegiatan yang realisasi fisiknya mengikuti realisasi keuangan, namun terdapat juga beberapa Sub Kegiatan yang realisasi fisiknya 100 % tetapi realisasi keuangannya kurang dari target yang ditetapkan. Hal ini bermakna bahwa beberapa sub kegiatan tersebut telah mampu menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil optimal sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tertera dalam table berikut ini :

Tabel 3.7. Realisasi Efisiensi Kinerja Anggaran Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Th 2022	
		Satuan	K	(Rp.)	K	Rp.
1	2	4	5	6	7	8
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	7.706.000	100,06	96,86
a	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	VUB	2,00	14.532.698.700	100,00	87,48
a	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Ton	140,52	1.532.401.500	112,42	96,42
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Unit	14,00	2.904.650.800	100,00	89,95
a	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Unit	1,00	830.508.800	100,00	98,97
b	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Unit	10,00	2.074.142.000	100,00	86,78

Sumber : Disnakkeswan 2023

Dari 38 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Keswan tahun 2022 terdapat 05 Sub kegiatan yang mampu mencapai target

kegiatan 100 % dengan menggunakan anggaran kurang dari 100 %. Hal ini merupakan suatu prinsip anggaran yang harus dipertahankan dimana dengan anggaran yang minimal tetapi mendapat mencapai hasil yang optimal.

Sub Kegiatan yang mampu melakukan efisiensi anggaran terutama pada kegiatan fisik berupa pengadaan barang/jasa baik dengan sistem tender maupun penunjukan langsung.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagai instansi teknis, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi seoptimal mungkin.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagai pelaksana atau OPD teknis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat telah melaksanakan tugas/kegiatan, baik kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Lombok Timur, dari APBD Provinsi NTB dan APBN TP Provinsi, maupun kegiatan rutinitas yang tidak didanai sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan pada point-point sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur secara umum dapat dikatakan baik, meskipun target Kinerja Utama tidak dicapai 100 % karena adanya kejadian luar biasa dan wabah penyakit PMK tersebut dapat diatasi dalam jangka yang sangat singkat dimana samapai akhir Desember 2022 Kabupaten Lombok Timur telah nol kasus baru. dan Pernyataan kinerja tersebut didukung oleh :

- a. Hasil pengukuran pencapaian sasaran utama yang ditetapkan telah dicapai dengan baik dengan interval 80 - 90 % atau dilaksanakan dengan efektif dan efisien ;
- b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur telah menggunakan dana secara efisien bila dibandingkan dengan beban output yang dihasilkan (kurang dari anggaran yang ditetapkan) seperti efisiensi pengadaan barang/jasa, efektif dalam menyelesaikan program dan kegiatan tanpa adanya kendala dan kegiatan yang tertunda.

Mengingat semakin beratnya tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan ke depan, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur harus segera berbenah diri baik dalam peningkatan kualitas SDM aparatur, etos kerja dan penataan administrasi pemerintahan yang baik dan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga pembangunan peternakan mampu menjawab tantangan dan dinamika perubahan yang sangat cepat dalam

pengembangan teknologi rekayasa genetika dan teknologi informasi digital akhir – akhir ini.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, sebagai bahan evaluasi kinerja oleh instansi yang berwenang dan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Selong, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lombok Timur,



K. H. MASYHUR, SP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661231 199203 1 150